

**PERENCANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN WISATA
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN ACEH BARAT
(Studi Kasus Pantai Lhok Bubon)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Administrasi Negara

Oleh

Fengki lovenia
1705905010017



**UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT**

2021



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT**

Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 05 Oktober 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Fengki Loveni


NIM : 1705905010017

Dengan Judul : Perencanaan Program Pengembangan Objek Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Barat

Yang diajukan untuk memenuhi Sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar.

Mengesahkan :

Pembimbing Utama :


Zuhrizal Fadhly, M.Si
NIDN.0019048405

Mengetahui :

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT**

Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jenjang : S1 (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi saudara :

Nama : Fengki Lovenia

NIM : 1705905010017

Dengan Judul: **Perencanaan Program Pengembangan Wisata Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten
Aceh Barat**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian pada tanggal 30 September 2021

Menyetujui,

Komisi ujian

Tandatangan

- 1 Ketua : Zuhrizal Fadhly, M.Si
- 2 Anggota : Sudarman Alwi, S.Ag., M.Ag
- 3 Anggota : Said Achmad Kabiru Rafiie, M.BA

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Fadhi Ilhamsyah, S.P., M.Si

NIDN.0017109101



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fengki Lovenia

NIM : 1705905010017

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dipandang sebagai Tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 04 Oktober 2021

Saya yang membuat pernyataan



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), di tambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering) nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan)kalimat Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.” (Q.S Luqman :27)

Ya Allah....

Jadikanlah Kami Kaya Akan Ilmu, Muliakanlah Kami Dengan Ketekunan Dan Hiasilah Diri Kami Dengan Kesabaran, Sesungguhnya Allah Tidak Akan Menguji Seorang Hamba Di Luar Batas Kemampuannya Dan Mintalah Pertolongan-Nya Dengan Shalat Dan Sabar

Alhamdulillah.....

*Dengan ridha-mu ya Allah
Amanah ini telah selesai, sebuah langkah usai sudah,
Namun itu bukan akhir dari perjalananku,
Melainkan awal dari sebuah perjalanan*

*Ayah dan Mamakku Tercinta
(Rosdiana dan Arsanudin)*

Terima Kasih atas

*Do'a dan air mata di setiap sujud mu yang selalalu mengiringi langkahku serta ketulusanmu yang menguatkan hatiku untuk terus berusaha menggapai asa. Setiap butir keringatmu menyemangatkan ku untuk mewujudkan harapanmu.
Kasih sayang mu sejukkan relung hatiku. Kini harapanmu telah ku gapai. Tumbuhkan tekad yang suci untuk selalu membahagiakanmu.
Terima kasih ku ucapkan sekali lagi atas segala kesabaranmu dan segala hal terbaikmu, kebaikanmu dan segala hal terbaik yang di berikan kepada putrimu.*

Terimakasih kepada kakaku tercinta deniirahayu mas tuti, dan adikku tercinta bobi arsaidil,arraahmat yasin, isa ariyadil yang telah yang telah mendukung dan mendoakan ku dalam menggapai setiap cita-cita ku.ucapan terima kasih ku kepada mami rona dan paman armi hefrizal yang telah mendoakan dan mendukungku untuk menggapai cita-citaku serta ucapan terima kasih ku kepada bapak Irsadi Aristora yang telah membantu ku dalam penulisan skripsi ini, ucapan terim kasih ku kepada keluarga besar UKM PK yang telah mendoakan dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ku dan ucapkan terim kasih utuk sahabat, teman seluruh keluarga tercinta yang telah mendukung dan mendoakan ku dari awal sampai akhir.

Ya Allah, jadikanlah aku anak yang sholeh, berbakti kepada, berbakti kepada orang tua,dan menjadi amal yang tak terputus bagi keduanya.

Dengan ridha Allah ku persembahkan karya yang sederhana ini kepada keluargaku tercinta. Simpuh sujudku dan terimakasihku kepada yang tercinta ayah handa dan Ibunda yang telah mendidik dengan penuh keiklasan atas segala perhatian,pengertian,dan dukungannya.

Fengki Lovenia

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas kuasa-Nya yang telah memberikan rahmat sehat dan lapang kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis skripsi yang berjudul “*Perencanaan Program Pengembangan Wisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat*” Ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat menyelesaikan studi dan meraih ilmu politik di Universitas Teuku Umar.

Dalam kesempatan ini pula, penulis dengan kerendahan hati yang amat dalam dan ketulusan hati ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih terutama kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta penulis persembahkan untuk Ayahanda Arsanudin serta Ibunda tercinta Rosdiana yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, kasih sayang tiada terbatas dan do’a tulusnya demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Zuhrizal Fadhly., M.Si selaku dosen pembimbing yang begitu penulis sanjung dan banggakan yang telah menjadi orang tua ke dua yang membimbing, memberi arahan, memotivasi, dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Basri, SH,.M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar di Meulaboh.
4. Bapak Fadhil Ilhamsyah, S.I.P, M.Si dan Ibu Safrida, M. AP selaku Ketua dan Sekertaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
5. Bapak Sudarman Alwi,M.Ag dan Bapak Said Ahmad Kabiro Rafie,M.BA selaku penguji yang telah memberikan keritik serta masukan dalam penyusunan skripsi
6. Teman-teman seperjuangan mahasiswa/i Program Studi Ilmu Administrasi Negara terkhusus angkatan 2017.

Dan akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal kebaikan dan keikhlasan ini mendapat balasan pahala dari Allah SWT, dengan kebaikan yang berlipat ganda dan mudah-mudahan skripsi ini ada manfaat. Amin Ya Rabbal' Alamin.

Meulaboh, 14 September 2021

Penulis,

(Fengki Lovenia)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan program pengembangan wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Barat khususnya pada objek wisata Pantai Lhok Bubon, Kecamatan Sama Tiga. Penelitian ini membahas bagaimana perencanaan program yang dilakukan Pemerintah terhadap upaya pengembangan objek Wisata Pantai Lhok Bubon Serta kendala dalam pelaksanaan kebijakan yang telah di tetapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian membuktikan perencanaan program pengembangan wisata sebagai upaya peningkatan pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat sudah membuat kebijakan dan program-program untuk mengembangkan objek wisata Pantai Lhok Bubon. Akan tetapi dalam pelaksanaan perencanaan program yang sudah di tetapkan belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan masi terdapat hambatan dari segi anggaran yang dimiliki, SDM yang belum memadai dan dasar hukum yang belum sepenuhnya diberikan kepada kabupaten dalam pengelolaan objek wisata di Kabupaten Aceh Barat.

Kata Kunci : Perencanaan, Pengembangan, Objek Wisata Pantai Lhok Bubon

ABSTRACT

This study aims to determine the planning of tourism development programs in increasing local revenue in West Aceh Regency, especially in the Lhok Bubun tourist attraction, Kuala Bubon District. policies that have been set. This study uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques in this study used the methods of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques through data reduction, data analysis, and drawing conclusions.

The results of the study prove that the planning of tourism development programs as an effort to increase Regional Original Income in West Aceh Regency has made policies and programs to develop Lhok Bubun beach tourism objects. However, in the implementation of the program planning that has been set, it has not been implemented optimally because there are still obstacles in terms of the budget, inadequate human resources and the legal basis that has not been fully provided to the district in the management of tourism objects in West Aceh Regency.

Keyword: planning, Development, Lhok Bubon Beach Tourism Object

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN.....	iii
LEMBARAN ORISINALITAS	iv
LEMBARAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
LEMBARAN ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Perencanaan	11
2.3. program.....	11
2.4. Pengembangan Wisata.....	12
2.5. Pendapatan Asli Daerah.....	12
BAB III METODELOGI PENELITIAN	13
3.1. Metode Penelitian	16
3.2. Sumber Data	16
3.3. Teknik Pengumpulan Data	16
3.4. Teknik Penentuan Informan	17
3.5. Instrumen Penelitian	17
3.6. Teknik Analisis Data	18
3.7. Uji Kredibilitas Data	18
3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian	20
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	22
4.1. Gambaran umum lokasi penelitian	23
4.2. Hasil Penelitian.....	24

4.2.1. Perencanaan Program Pengembangan wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Barat.....	28
4.2.2. Indikator Keberhasilan Perencanaan Program Pengembangan wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Barat	31
4.2.3. Kendala Dalam Perencanaan Program Pengembangan wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Barat.....	36
BAB V PEMBAHASAN	39
5.1. Perencanaan Program Pengembangan wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Barat.....	39
5.2. Indikator Keberhasilan Perencanaan Program Pengembangan wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Barat	41
5.2.1. Kebijakan	41
5.2.2. Rancangan.....	43
5.2.3. Analisis	46
5.3 Kendala pelaksanaan Perencanaan Program Pengembangan wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Barat	47
BAB VI PENUTUP	49
6.1. Kesimpulan.....	49
6.2. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel informen.....	16
Tabel 3.2 Tabel jadwal penelitian	19
Tabel 4.1Tabel SDM DISPARPORA berdasarkan golongannya	22
Tabel 4.2 Tabel SDM DISPARPORA berdasarkan pendidikannya	22
Tabel 5.1 Tabel Peraturan Pengembangan Objek Wisata.....	35
Tabel 5.2 Tabel perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata	36
Tabel 5.3 Tabel Rencana program, kegiatan dan pendanaan bidang pariwisata ...	37
Tabel 5.5 Tabel pendanaan program objek wisata Pantai Lhok Bubon.....	45
Tabel. 5.6 Tabel Jumlah PAD dari objek wisata Pantai Lhok Bubon.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman wawancara

Lampiran 2. Dokumentasi wawancara

Lampiran 3. SK Pembimbing

Lampiran 4. Surat izin permohonan penelitian

Lampiran 5. Surat pernyataan selesai penelitian

Lampiran 6. Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia salah satu Negara dengan sumber daya alam yang cukup berpotensi serta keanekaragaman agama, ras, suku, budaya dan adat istiadat. Berbagai keragaman yang dimiliki pastinya memberikan keuntungan terhadap maju dan berkembangnya pemerintahan Indonesia. Kekayaan sumber daya alam menjadi aset utama untuk di lestarikan serta dikelola sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi Negara. Tidak hanya mampu melestarikan alam, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memajukan kebudayaan, kepariwisataan juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran serta dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah. Dimana hal tersebut berdasarkan pada undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Pariwisata menjadi salah satu potensi yang dimiliki daerah dengan ciri khas yang dimiliki daerah tersebut. Pengembangan serta pengelolaan pariwisata Indonesia sangatlah baik, hal ini dibuktikan banyaknya destinasi yang terdapat di Indonesia, sehingga pariwisata menjadi penyumbang devisa Negara yang sangat besar. Banyaknya destinasi wisata yang ada tentu sangat perlunya ada lembaga yang mengurus hal-hal masalah kepariwisataan. Sesuai dengan peraturan presiden Rrepublik Indonesia No.19 tahun 2015 tentang menteri kepariwisataan, dimana kementerian pariwisata berada di bawah serta tanggung jawab langsung terhadap presiden yang dipimpin oleh seorang menteri.

Kementerian pariwisata memiliki tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pada kepariwisataan dalam membantu presiden menyelenggarakan pemerintahan daerah. Di tingkat provinsi, masalah kepariwisataan diurus oleh dinas kebudayaan dan pariwisata (Dispubdar) yang memiliki tugas pokok dalam menjalankan sebagian urusan rumah tangga daerah berdasarkan penyerahan hak dalam otonomi daerah pada bidang kepariwisataan dan menjalankan tugas pembinaan yang telah diberikan Gubernur atau kepala daerah. Pada tingkat Kabupaten/Kota dinas kebudayaan dan pariwisata (Dispubdar) memiliki wewenang dalam mengatur urusan kepariwisataan. Seperti halnya dinas pariwisata pemuda dan olahraga pada kabupaten Aceh Barat memiliki tugas sebagai pelaksana urusan Pemerintahan daerah pada bidang pariwisata dan pelestarian budaya di wilayah kerjanya serta merumuskan kebijakan bidang pariwisata, kesenian, kebudayaan dan perfilman, penyelenggaraan pariwisata dan kebudayaan, pembinaan dan pembimbingan pada pelaku pariwisata dan budaya di wilayah kerjanya.

Perlunya perhatian khusus dalam pengelolaan serta pengembangan sektor pariwisata sebagai sektor penggerak ekonomi dengan kontribusi yang tinggi terhadap peningkatan perekonomian daerah. Pemerintah harus semaksimal mungkin dan inovatif untuk terus menciptakan perencanaan-perencanaan yang strategis dalam mengembangkan potensi wisata yang ada sehingga memberikan dampak baik dalam pelestarian wisata kedepan. Salah satu daerah di Indonesia dengan potensi wisata cukup menarik untuk terus dikembangkan dan tidak kalah dengan wisata lainnya ialah terdapat pada provinsi Aceh khususnya Kabupaten Aceh Barat. Aceh Barat daerah yang terdapat pada Provinsi Aceh dengan luas

wilaya darat 2.927,95 km², lautan sejauh 12 mil seluas 957,38 km² serta dengan garis pantai sepanjang 54,84 km. Secara administratif Kabupaten Aceh Barat terbagi dalam 12 kecamatan, 36 kemukiman, dan 322 Gampong. 192 Desa di antaranya berada didaratan dan 83 Desa yang terletak di lembah. 42 Desa terletak dilereng. Meulaboh merupakan ibu kota dari Kabupaten Aceh Barat. dengan penduduk mayoritas Islam serta dengan mata pencaharian pada sektor perikanan, perkebunan, pertanian dan peternakan.

Melihat dari keadaan geogrfisnya tentu Aceh Barat dari sumber daya Alam memiliki tempat-tempat yang cukup berpotensi sebagai objek wisata yang menarik. Berdasarkan hasil keputusan Bupati Aceh Barat terdapat 35 gampong wisata dengan berbagi potensi yang dimiliki. Banyaknya objek wisata yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat dengan berbagai potensi yang dimiliki tentunya perlu untuk di kelola dengan baik sehingga akan menarik daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Salah satunya ialah objek wisata Pantai Lhok Bubon yang terletak di Gampong Lhok Bubon Kecamatan Sama Tiga. Pantai Lhok Bubon menjadi salah satu objek wisata dengan potensi yang cukup menarik sehingga membuat para wisatawan ramai berkunjung dengan keindahan pantai yang dimiliki mampu menarik perhatian wisatawan untuk berwisata ke Pantai Lhok Bubon baik itu wisata lokal maupun luar daerah. Meskipun memiliki keindahan yang cukup menarik akan tetapi Pantai Lhok Bubon masi belum terkelolah dengan maksimal baik itu dari segi fasilitas yang tersedia maupun lokasi tempat yang belum tertata dengan baik sehingga perlunya dilakukan perencanaan untuk pengembangan wisata guna meningkatkan ketertarikan wisatawan untuk berkunjung.

Dalam pengelolaannya pemerintah daerah harus lebih perhatian untuk mengembangkan wisata yang ada dengan perencanaan-perencanaan yang strategis dan inovatif guna meningkatkan daya tarik wisata sehingga mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung tidak hanya wisatawan lokal daerah jugak wisatawan dari mancanegara sehingga dapat memberikan kontribusi besar pada daerah tentunya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat. Seperti yang diharapkan semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung maka besar pula sumbangan yang di dapat oleh daerah. Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik dalam melakukan penelitian terkait “ Perencanaan Program Pengembangan Wisata Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Aceh Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ialah :

1. Bagaimana perencanaan program pengembangan objek wisata Pantai Lhok Bubon?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam melakukan pengembangan wisata Pantai Lhok Bubon ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian permasalahan yang sudah di uraikan maka, tujuan dari pada penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan program pengembangan Objek Wisata Pantai Lhok Bubon kabupaten Aceh Barat
2. Untuk mengetahui kendala serta hambatan dalam melakukan perencanaan program pengembangan Objek Wisata Pantai Lhok Bubon di Kabupaten Aceh Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca baik itu secara langsung yang terkait didalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Secara teoritis

Dari penelitian ini mampu menambah pengetahuan serta memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan khususnya pada Ilmu Administrasi Negara. Serta menjadi bahan pengetahuan terhadap peneliti dan maha siswa dalam melakukan penelitian-penelitian berikutnya yang lebih mendalam terkait perencanaan program pengembangan wisata pada kabupaten Aceh Barat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan serta pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap upaya pengembangan potensi wisata. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan sebagai pengetahuan tentang perencanaan program pengembangan wisata serta seperti apa kendala dalam pengembangan wisata pada Kabupaten Aceh Barat. Dari penelitian ini juga dengan harapan memberikan dampak

kemanfaatan, kesejahteraan serta lapangan kerja terkait dalam aktivitas objek wisatawan di Kabupaten Aceh Barat.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menggambarkan penulisan/susunan skripsi ini, dapat penulis jabarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab I ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab II ini terdiri dari peneliti terdahulu, landasan teori yang Berkaitan serta dapat mendukung penulisan skripsi

BAB III : metodologi penelitian

Pada Bab ini berisikan metode penelitian, sumber-sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informen, instrumen penelitian, dan teknis analisis data, serta uji kredibilitas data.

BAB IV : Hasil penelitian

Pada Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dilapangan, yang disajikan berdsarkan data yang di peroleh di lapangan

BAB V : Pembahasan

Pada Bab V ini meberikan hasil dari kesimpulan peneliti yang di rangkum berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan sesuai berdasarkan terori serta rumusan masalah dalam penelitian

BAB VI : Kesimpulan dan saran, yang terdiri dari kesimpulan serta saran terhadap hasil penelitian dilapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terkait penelitian perencanaan program pengembangan wisata peneliti mengambil beberapa rujukan yang menjadi bahan acuan untuk memudahkan dalam penelitian ini. Beberapa rujukan dari penelitian terdahulu diantaranya penelitian terkait Pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Takala (Rusfadana Dwi Putra, dkk : 2020), kemudian penelitian terkait pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat di lihat dari perspektif implementasi kebijakan (Ikke febriandhika, Teguh & Kurniawan, 2020), kemudian penelitian terkait manajemen pengelolaan desa wisata pada desa cimanggu, Kecamatan cisalak, kabupaten subang (Siti Alfiah, jeni andriani, rosa lesmana, nardi sunardi, & anah furyanah. 2019) selanjutnya peran pemerintah daerah pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Simeulue (Nanda Safanganwan 2019), selanjutnya terkait penelitian perencanaan pengembangan destinasi wisata menggunakan analisis MSP+DM (Setiawan Priatmoko 2019) dan penelitian yang membahas terkait tantangan indonesia dalam penataan pariwisata super prioritas dalam persaingan global (akbar prawira, hendrawan ahmad jofari, engar pangestu candra widodo) dan penelitian terkait promosi wisata melalui *digital diplomacy* (faturachman alputra sudirman : 2020).

Banyak penelitian terkait pariwisata yang sudah di teliti tentunya tetap menghadirkan perbedaan dari setiap penelitian. Begitu jugak dalam penelitian ini

terdapat perbedaan-perbedaan dengan peneliti-peneliti sebelumnya yang membahas pariwisata, perbedaan peneliti disini ialah terletak pada lokus dan focus penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian terkait perencanaan program pengembangan wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Barat. Peneliti sendiri ingin melihat seperti apa perencanaan program untuk pengembangan wisata sehingga mampu menarik perhatian para wisatawan untuk berkunjung baik local maupun luar daerah sehingga memberikan kontribusi terhadap daerah dalam pemasukan pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Barat.

2.2 Perencanaan

Defini perencanaan menurut Wilson dalam buku konsep dan kajian ilmu perencanaan oleh (Dr.taufiqurokhman : 2008 : 16) Perencanaan ialah sebagai salah satu proses dalam hal merubah suatu keadaan yang ingin dicapai sesuai dengan apa yang di inginkandan di tuju oleh orang atau badan melalalui perencanaan itu.Perencanaan yang baik tentunya memiliki berbagai cakupan sebelum merencanakannya yang meliputi analisis, kebijakan dan rancangan. Perencanaan jugak memiliki ciri-ciri pokok secara umum yang mencakup berbagai tindakan yang berurutan dan ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terhadap masa yang akan datang dengan konsep serta sejumlah tahapan yang telah di tetapkan.a

Selanjutnya perencanaan menurut Pramuji Atmosudirjo dalam buku Aplikasi Teori Perencanaan oleh (Djuni Prihatin, dkk : 2019: 117) ialah ketentuan serta perhitungan dalam merumuskan suatu untuk dijalankan dalam

mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan memperhatikan siapa, dimana, dan bagaimana melakukannya.

Sedangkan perencanaan menurut Alder dalam (Djuni Prihatin, dkk : 2019:118) merupakan suatu proses untuk menentukan tujuan dari apa yang ingin di capai dengan memperhatikan tahapan-tahapan penting sehingga mempermudah tercapainya tujuan yang di inginkan.

Dalam Undang-Undang Nomor.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan Perencanaan ialah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan di masa depan secara terarah dan tepat, melalui tahapan urutan pilihan dengan memperhitungkan berbagai sumber daya yang tersedia.

Selanjutnya perencanaan diartikan sebagai proses memutuskan tujuan-tujuan yang akan dikejar dalam jangka waktu yang akan datang dan apa yang penting untuk dilakukan agar tujuan-tujuan yang di harapkan itu dapat tercapai dengan baik.

Berbagai definisi yang dikemukakan para ahli terkait perencanaan bahwa dapat di ambil kesimpulan di mana perencanaan menjadi langkah awal dalam suatu perumusan program/kebijakan yang ingin dacapai dengan memberhatikan berbagai pertimbangan-pertimbangan serta proses dan tahapan-tahapan yang menghantarkan suatu perencanaan itu mudah untuk dicapai atau tercapai sesuai dengan apa yang di harapkan.

2.2.1 Fungsi Perencanaan

Menurut Handoko dalam Refni Elviza (2018:18) mengemukakan terdapat dua fungsi perencanaan diantaranya:

1. Melakukan penetapan serta memilih pilihan yang tepat untuk tujuan organisasi.
2. Pemilihan dalam penentuan program prosedur, strategi, metode, kebijaksanaan, serta sistem anggaran yang sesuai dan melakukan penyesuaian terhadap standar kebutuhan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Fungsi perencanaan oleh Robbins dan Coulter dalam (Uly Mabruroh Halide 2020:50) terdapat empat fungsi perencanaan ialah:

1. Perencanaan menjadi pengarah pengarah
2. Perencanaan mampu meminimalisasi ketidaksesuaian
3. Perencanaan mampu meminimalisasi pemborosan sumber daya dan
4. Perencanaan sebagai penentuan standar terhadap pengawasan kualitas.

Menurut Syam dalam (Djuni Prihatin,dkk: 2019 :62) setidaknya terdapat lima unsur dalam perencanaan di antaranya :

1. Tujuan, dalam hal ini dalam proses perencanaan tentunya harus mempunyai tujuan yang jelas secara terperinci terhadap tujuan yang ingin dicapai
2. Policy, selain memiliki tujuan yang jelas tentunya juga harus memperhatikan metode serta cara untuk mencapai suatu tujuan.
3. Prosedur, selain itu juga pentingnya prosedur yang memuat pembagian tugas sesuai dengan bidang dan keahlian yang dimiliki

4. Progress, dalam sebuah perencanaan tentunya jugak harus melihat progres kriteria atsu standar untuk melihat/mengukur sejauh mana perencanaan itu terlaksana baik itu dari segi kualitas serta kuantitas dan jangka waktu yang sudah di habiskan
5. Program kerja yang terstruktur dan terperinci.

Tentunya terdapat berbagai pertimbangan yang dilakukan dalam proses pembuatan suatu perencanaan dengan syarat-syarat diantaranya :

- a. Logik, masuk akal
- b. Realistic, nyata
- c. Sistematis dan ilmiah
- d. Objektif
- e. Fleksibel
- f. Manfaat, optimis dan
- g. Efisiensi

Dari pengertian Perencanaan diatas maka dapat dibagi dalam 4 aspek keberhasilan dari pengembangan perencanaan wilayah maupun wisata menurut (Pealinkc dan Nijkamp. 1975)

1. Inventarisasi, klasifikasi dan Evaluasi Sumber daya
2. Aspek Ekonomi
3. Aspek kelembagaan (Institusional)
4. Aspek Lokasi (spasial)

2.3 Pengertian Program

Menurut siagian dalam (Nurhanifa, 2015:48) Penyusunan program sebagai rangkaian utama yang dilakukan dalam proses perencanaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan ciri-ciri operasional yang telah ditetapkan.

Menurut Jones dalam (Nurhanifa, 2015:49) Program merupakan unsur utama dalam terlaksananya perencanaan-perencanaan yang akan dijalankan. Terdapat berbagai aspek dalam proses pembuatan program diantaranya :

Tujuan dari kegiatan yang akan di capai

- a. Bentuk kegiatan yang di ambil dalam pencapaian tujuan
- b. Aturan yang harus menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan
- c. Perkiraan anggaran yang sesuai
- d. Strategi dalam pelalaksanaan

Program ialah sebagai instrument dari kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan untuk dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga guna mencapai tujuan serta sasaran dalam memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang di koordinasikan oleh instansi pemerintahan.

2.4 Pengembangan Wisata

Menurut Sukmadinata (2008:164), dalam Septiwirawan, Arifin, dkk (2020:5) Pengembangan merupakan suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, agar dapat dipertanggung jawabkan.

Pengembangan wisata menurut Barreto dan Giantari (2015:783) ialah suatu usaha untuk meningkatkan dan memajukan objek wisata hingga objek

wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik, agar dapat menarik minat para wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut.

Pengembangan wisata juga diartikan sebagai salah satu komponen dari pembangunan Nasional yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan suatu daerah, pengembangan pariwisata ini ditujukan untuk meningkatkan perekonomian Negara Indonesia.(Purnama dan Meirinawati. 2019:2).

Dari definisi yang dipaparkan oleh para ahli di atas dapat kita ambil kesimpulan dimana pengembangan wisata merupakan kegiatan yang dilakukan secara terencana dalam upaya mengembangkan pariwisata yang lebih menarik baik dari segi fasilitas maupun potensi wisatanya sehingga akan semakin menarik perhatian wisatawan untuk melakukan wisata.

2.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Undang-Undang Nomor. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pasal 1 ayat 2 ialah pemerintah daerah adalah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asset otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan RI sebagaimana di sebut dalam UUD 1945

Sedangkan dalam ayat 13 pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Menurut ridwansya (2003:49) pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom.

Menurut Halim (2012) dalam (Rusfandana Dwi Putra dkk, 2020:983) pendapatan asli daerah ialah penerimaan yang diperoleh daerah dari ekonomi asli daerah diantaranya retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan sebagainya. Pendapatan asli daerah yang jugak merupakan pendapatan dari sumber-sumber yang dimiliki wilaya itu sendiri berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan dalam pencarian makna, pengertian, karakteristik, serta deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode yang bersifat alamiah dan disajikan secara naratif.

3.2 Sumber Data

- a. Data primer merupakan sumber data yang di peroleh peneliti secara langsung melalu proses penelitian tanpa adanya campur tangan orang lain
- b. Data skuder merupakan sumber data yang diperoleh cecara tidak langsung dalam artian data ini di terimah melalu orang lain atau semacam dokumen, berita dan sebagainya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti dari sugiyono di antaranya :

1 Observasi

Nasution (1998) dalam sugiyono (2017 :226) menjelaskan observasi menjadi unsur penting dalam ilmu pengetahuan, sehingga segala data hanya dapat di sajikan berdasarsarkan hasil observasi yang dilakukan secara nyata di lapangan.

2. wawancara

Dari esterberg (2002) dalam sugiyono (2017:231) mendefinisikan wawancara merupakan pertukaran ide/infomasi antara dua orang melalui tanya jawab sehingga memberikan hasil dan makna yang dapat di sajikan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah penemuan data yang diperoleh melalui tulisan-tulisan serta catatan-catatan yang memuat peristiwa lalu. Seperti catatan harian, karya-karya monumental seseorang.

3.4 Teknik Penentuan Informasi

Penentuan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik atau cara untuk mendapatkan sumber data dengan berbagai pertimbangan. Sugiyono (2017:21)

Dari teknik yang digunakan peneliti tersebut, maka yang menjadi informan dalam penelitian ialah :

No	Informan	Jumlah
1	Kadis DISPARPORA Aceh Barat	1
2	Kabid perencanaan dan keuangan	1
3	Kabid pariwisata	1
4	Sub. Bagian keuangan Aceh Barat	1
5	Geucik lhok bubon	1
7	Masyarakat Lhok Bubon	3
8	Wisatawan	2

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah peneliti itu sendiri. Dimana semua proses validasi dilakukan oleh peneliti untuk melihat kesiapan mampu atau tidaknya peneliti untuk melakukan penelitian hingga terjun kelapangan. Sebagai human instrument dalam melakukan penelitian tentunya mampu memilih informan yang dapat memberikan data serta menilai kualitas data, menafsirkan data, analisis data, dan memberikan kesimpulan yang valid atas temuan yang ditelitinya. (Sugiyono, 2017:222)

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data oleh model Miles dan Huberman (1948) kutipan sugiyono (2017:246) mendefinisikan terdapat 3 tahapan dalam proses analisis data di antaranya :

1. Data reduction

Dalam proses pengambilan data tentunya peneliti memperoleh data yang cukup banyak di lapangan, maka pada tahapan reduksi data peneliti mampu merangkum atau memilih data-data yang dianggap penting sehingga menghasilkan data yang real dan jelas.

2. Data display

Penyajian data sebagai tahapan selanjutnya setelah dilakukannya reduksi data untuk memberikan hasil yang lebih kongkrit dalam bentuk uraian singkat maupun bagan yang dapat disajikan melalui grafik, tabel, pictogram, phi chard dan lainnya.

3. Verifikasi

Setelah tahapan reduksi dan display maka untuk selanjutnya verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahapan verifikasi ini masih bersifat sementara sehingga belum dapat dikatakan kredibel dan bisa saja berubah saat tidak menemukan bukti-bukti yang dapat mendukung kevalidan data. Namun sebaliknya jika di peroleh bukti-bukti yang mendukung kevalidan kesimpulan awal dapat dikatakan kredibel.

3.7 Uji Kredibilitas Data

Dari sugiyono (2017:270) terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menguji kredibilitas data seperti. Perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus Negatif dan member check. Berbagai teknik uji kredibilitas data yang ada peneliti tertarik untuk melakukan perpanjangan pengamatan dan meningkatkan ketekunan dimana dalam proses perpanjangan pengamatan mampu meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas data dengan cara kembali kelapangan melalui perpanjangan pengamatan. pada proses meningkatkan ketekunan peneliti akan lebih cermat serta berkesinambungan sehingga memberikan kepastian data yang sistematis dan kredibel.

3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pariwisata Pemuda Kebudayaan Dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat, dengan tempo waktu kurang lebih ialah 6 bulan sesuai dengan yang tertera pada tabel

No	Kegiatan	Tahun 2020-2021						
		11	12	3	4	5	6	9
Tahap 1								
1	Persiapan penelitian							
2	Obsevasi awal							
3	Pembuatan proposal							
4	Konsultasi							
5	Perbaikan							
6	Seminar proposal							
7	Revisi							
Tahap II								
8	Penelitian di lapangan							
9	Pengolahan data							
10	Analisis data							
Tahap III								
11	Penulisan hasil penelitian							
12	Konsultasi							
13	Seminar hasil							

14	Perbaikan								
Tahap IV									
15	Sidang								

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lhok Bubon merupakan salah satu Gampong yang terletak di Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat. Yang memiliki keindahan pantai sehingga menarik perhatian untuk berlibur ke Pantai Lhok Bubon. Dengan keindahan pantai serta lingkungannya yang asri, Pantai Lhok Bubon menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Aceh Barat dengan jumlah pengunjung yang ramai setiap minggunya sehingga Pantai Lhok Bubon menjadi salah satu fokus pemerintah untuk mengembangkan wisata tersebut.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan tugas serta tanggung jawab pada bidang pariwisata sendiri di berikan kepada Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga (DISPARPORA). Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 menjelaskan tentang DISPARPORA mempunyai tugas dalam membantu Bupati untuk pelaksanaan urusan pemerintahan pada bidang pariwisata, pemuda dan olahraga yang merupakan kewenangan Daerah untuk mengurusinya.

Adapun struktural organisasi dinas pariwisata pemuda dan olahraga (DISPARPORA) Aceh Barat ialah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. Subbagian perencanaan dan keuangan
3. Kepala bidang pariwisata terdiri atas :
 - a. Seksi destinasi wisata
 - b. Seksi pemasaran dan pengembangan sumber daya pariwisata; dan

- c. Seksi ekonomi kreatif

4. Kepala bidang pemuda dan olahraga, terdiri atas :

- a. Seksi kepemudaan
- b. Seksi keolahragaan; dan
- c. Seksi sarana dan prasarana

5. UPTD

6. kelompok jabatan fungsional

Berdasarkan struktur organisasi DISPASPORA tersebut yang memiliki tanggung jawab terhadap Bupati Aceh Barat untuk melaksanakan tugas serta fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya urusan kepariwisataan jugak diperjelas oleh peraturan bupati Nomor 54 pasal 10 tahun 2020 mengatur ketentuan tugas sebagai berikut :

1. Kepala dinas, memiliki tugas dalam memimpin dinas untuk melakukan urusan pemerintahan pada bidang pariwisata, pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tygas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, kepala dinas menyelenggarakan fungsi senagai berikut :
 - a. Pengendalian, pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kesekretariatan
 - b. Pengendalian pelaksanaan penyusunan rencana kerja tahunan dan jangka menengah, dan jangka panjang
 - c. Pengendalian pelaksanaan perumusan kebijakan daerah dibidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaaan dan keolahragaan

- d. Pengendalian dan pengorganisasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang dibidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaaan dan keolahragaan
 - e. Pelaksanaan pembinaan UPTD
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi terkait
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - h. Pelaksaaan fungsi kedinasan lainnya yang di berikan oleh bupati
2. Sekretariat, memiliki tugas dalam melaksanakan pelayanan administratif,koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian ketatausahaan usahaaan, program dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan
 3. Subbagian umum dan kepegawaian, memiliki tugas dalam melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, kerja sama, kehumasan, dan protokol, pengelolaan barang milik daerah/Negara, hukum dan ketatalaksanaan
 4. Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas dalam melaksanakan perencanaan anggran, pemantauan evaluasi dan pelaporan
 5. Bidang pariwisata, memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan destinasi, pemasaran ekonomi kreatif dan industri pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bidang pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja, program dan anggran bidang pariwisata
 - b. Pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis, dan destinasi

- c. Pelaksanaan pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata
 - d. pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif
 - e. pembinaan dan pengembangan objek wisata, sarana, tenaga kerja kepariwisataan dan sumber daya alam wisata
 - f. pemberian pertimbangan teknis dan pengawasan izin pengelolaan bidang usaha objek wisata, taman kreasi, akomodasi, rumah makan dan biro perjalanan wisata
 - g. pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan objek wisata, sarana, tenaga kerja kepariwisataan dan sumber daya alam wisata
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - i pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan kepala dinas.
6. Kasi destinasi wisata, memiliki tugas dalam melaksanakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknik pada bidang pengembangan pariwisata.
7. Kasi pemasaran dan pengembangan sumber daya pariwisata, memiliki tugas dalam melaksanakan pemasaran, pengembangan sumber daya pariwisata dan pembinaan .
8. Seksi ekonomi kreatif, memiliki tugas dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan ekonomi yang kreatif di tingkat dasar, pelaksanaan riset, edukasi serta pengembangan SDM, infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran, fasilitas hak kekayaan intelektual serta hubungan antar lembaga dan wilayah.

Adapun sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki dinas pariwisata pemuda dan olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Aceh Barat khususnya di bidang pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.1.1

SDM DISPARPORA Aceh Barat bidang pariwisata berdasarkan golongannya

NO	GOLONGAN	Jumlah SDM
1	Golongan IV	3 orang
2	Golongan III	2 orang
3	Golongan II	-
4	Golongan I	-
5	Tenanga Harian Lepas	2 orang
Total		7 orang

Sumber: Dokumen DISPARPORA Aceh Barat

Adapun pada tingkat pendidikan sumber daya manusia (SDM) DISPARPORA Aceh Barat khususnya di bidang pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut :

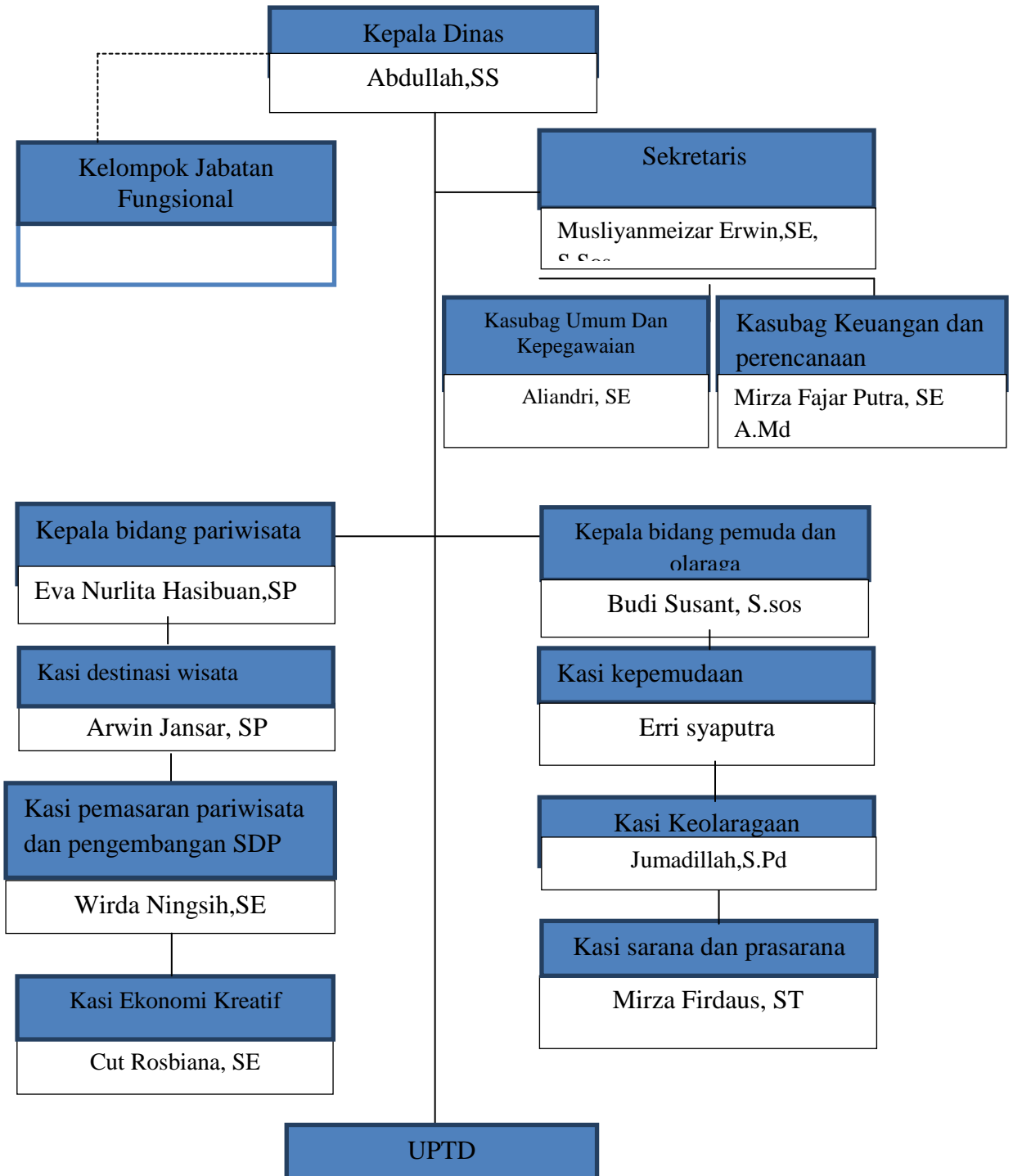
Tabel. 4.1.2

SDM DISPARPORA (Bidang Pariwisata) Kabupaten Aceh Barat berdasarkan tingkat pendidikannya

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Starata S2/Magister	-	-	-
2	Starata S1/Sarjana	5	2	7
3	Diploma	-	-	-
4	SMA/Sederajat	-	-	-
5	SMP/Sederajat	-	-	-
Total				7

Sumber: Dokumen DISPARPORA Aceh Barat

4.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga



4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Perencanaan program pengembangan wisata pantai lhok bubon dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait perencanaan program pengembangan wisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat. Objek wisata Pantai Lhok Bubon menjadi salah satu penyumbang retribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Barat yang setiap tahunnya memberikan retribusi pajak terhadap penambahan Kas Daerah. Pendapatan yang diperoleh melalui penyewaan bangunan yang di bangun oleh pemerintah dan di kelolah oleh pihak Gampong. Dalam perencanaan program sebagai upayah pengembangan potensi wisata sejauh ini sudah banyak program-program yang sudah di jalankan. Sebagaimana yang di sampaikan kepala dinas pariwisata Bapak Abdullah,SS mengatakan :

“ Pada sektor pariwisata sangat penting untuk terus dilakukan pengelolaan dengan berbagai perencanaan-perencanaan tentunya.Perencanaan Secara kreatif sehingga memberikan dampak yang baik untuk pengembangannya, dan sejauh ini pengelolaan sektor pariwisata di Aceh Barat terus kita lakukan dan jugak berbagai program yang sudah terjalankan seperti di Lhok Bubon sendiri sejauh ini jugak sudah dilakukan pengelolaan dengan menjalankan program sebagai upaya kita untuk terus menarik perhatian para pengunjung. Program yang sudah terjalankan ya seperti penyediaan fasilitas dilokasi wisata, dan jugak terus dibuatnya perencanaan-perencanaan kedepannya agar lebih baik serta ramai wisatawan yang berkunjung nantinya”(wawancara Tanggal 06 September)

Selanjutnya disampaikan oleh Ibu Eva Nurlaita Hasibuan.,S.Pselaku

Kabid Pariwisata

“ Perencanaan program sebagai upaya pengembangan PantaiLhok Bubon selama ini sudah kita jalankan seperti adanya fasilitas yang dibuat dari pemda terus jugak ada pembangunan kantin, musolah, kamar mandi dan itu semua kita kelola dengan baik melalui kerjasama dengan pihak gampong,kita memberikan fasilitas untuk selanjutnya kita serahkan ke pihak gampong untuk merawatnya agar apa yang sudah di sediakan terkelola dengan baik, selama ini upaya yang sudah dilakukan untuk mengembangkan wisata lhok bubon masi belum terjalankan dengan maksimal namun, kita terus membuat perencanaan-perencanaan program yang nantinya bisa untuk kita jalankan sehingga lebih bagus lagi,kita jugak terus melakukan koordinasi dengan gampong karena sangat penting kerjama dengan gampong untuk terjalankannya program yang di nanti jadi untuk kita jalankan, harapannya untuk program-program yang sudah kita buat dapat terjalankan sesuai apa yang diharapakn kedepannya”.
(Wawancara 06 September 2021)

Selanjutnya di sampaikan bapak mirza Selaku Kabid Perencanaan dan Keuanagan

“Untuk perencanaan-perencanaan seperti, pengembangan wisata itu, tentu saja kita buat dan lakukan, karena memang objek pariwisata itu memberi kontribusi yang baik terhadap pendapatan kas daerah baik itu untuk pendapatan gampong maupun kas daerah.jadi perencanaan yang sudah kita susun selama ini sudah kita jalankan danada jugak yang belum terjalankan, sejauh ini kita terus membuat suatu program yang sifatnya memang membangun dan mengembangkan potensi wisata itu sendiri.kamipun dibidang perencanaan sebagai yang merekap hasil perencanaan dari setiap bidang khususnya di bidang pariwisata memang ada rencana-rencana kedepannya untuk nantinya bisa kita jalankan sesuai dengan apa yang di targetkan begitu”(wawancara tanggal 06 September 2021)

Selajutnya disampaikan oleh Geucik Gampong Lhok Bubon

“ Dilihat dari potensi lokasi Lhok Bubon ini memang bagus dan sudah lama menjadi tempat orang-orang bermain, setelah tsunami tahun2004 itu Lhok Bubon sudah ada pengunjungnya. Akan tapi belum sebanyak seperti sekarang ini, dari tahun 2005 saya menjadi Geucik di sini memang banyak perubahan-perubahan yang ada, kalau kita lihat pengunjungnya memang terus banyak setiap minggunya kitapun dari pihak gampong mencoba mengelola agar lebih baik lagi selama ini pengelolaan yang sudah kita

gerakan seperti membangun kantin melakukan pembersihan, kami juga saat ini sedang mengajukan terkiat qanun yang menjadi dasar untuk kami bisa lebih leluasa dalam mengelolanya itu juga menjadi salah satu upaya kita untuk terus mengembangkan wisata itu. karena memang selama ini kita tidak sepenuhnya melakukan pengelolaan apalagi membuat perencanaan-perencanaan program itu semaksimal mungkin karena memang kita pihak gampong sendiri belum memiliki dasar hukum yang jelas.makanya saat ini kami masi meunggu qanun itu untuk di diterimah dan menjadi pegangan untuk kami namun, walaupun qanun itu belum ada kami juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk membantu mengembangkan Wisata Lhok Bubon ini”(wawancara tanggal 05 September 2021)

Peneliti juga mengambil beberapa informan dari unsur masyarakat Aceh Barat.Disampaikan oleh Ibuk Damiati selaku masyarakat Gampong Lhok Bubon mengatakan :

“ Kalau untuk PantaiLhok Bubon ini memang bagus ada banyak kantin-kantin baik itu punya pribadi ataupun bukan terus ada juga tempat-tempat duduk yang ada payung di jalan-jalan yang dari semen itu, ya artinyaakan pelaksanaan perencanaan program dari pemda maupun gampong itukan adalah walaupun maunya masi banyak lagi yang harus ditambah, diperbaiki tapi kalau kita lihat saat ini boleh lah sudah lumayan bagus muda-mudahan kedepannya terus perbaiki supaya lebih bagus lagi,orang-orangpun semakin ramai berkunjung nantinya kan itu bagus” (wawancara tanggal 05 September)

Selanjutnya disampaikan oleh Ibuk Latriana selaku masyarakat Gampong Lhok Bubon mengatakan :

“ Wisata Lhok Bubon ini ramai pengunjung setiap minggunya karna memang selain pantainya yang cantik ini tempatnya luas jadi enak untuk tempat berlibur, kalau dari segi pengelolaannya kita lihat ya memang sudah dikelolah hal itu terbukti ada nya fasilitas yang di sediakan kayak tong sampah itu terus ada juga musola, kamar mandi kantin-kantin, tapi sebenarnya perlu lagi maunya penyediaan yang lebih banyak kayak tong sampah itu terus semacam bangunan-bangunan yang baguslah.karena kan lhok bubon ini pengunjungnya itu ramai kalau hari libur itu jadi kalau makin bagus kan makin tertarik orang datang nantinya.”(wawancara tanggal 05 September 2021)

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwasanya dapat disimpulkan dalam perencanaan program pengembangan wisata itu sendiri sudah dijalankan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi wisata yang ada khususnya di Pantai Lhok Bubon sudah ada program-program yang telah di dijalankan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Akan tetapi masih perlu pembenahan, perencanaan program yang lebih strategis kreatif dan inovatif serta tidak lepas pula landasan dasar hukum dalam pengelolaannya.

4.2.1 Indikator Keberhasilan Perencanaan Program Pengembangan Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabuptaen Aceh Barat

4.2.1.1 Kebijakan

Dalam upaya pengembangan Objek Wisata Pantai Lhok Bubon Pemerintah sudah membuat berbagai kebijakan, seperti penetapan lokasi wisata, perencanaan-perencanaan program kegiatan sebagai dasar untuk melakukan pengembangan Objek Wisata Pantai Lhok Bubun. Sebagaimana di sampaikan Ibuk Eka Nurlaita Hasibuan, S.P (Kepala Bidang Pariwisata) :

“ Objek wisata Pantai Lhok Bubon itu menjadi salah satu objek wisata yang menarik di Aceh Barat sesuai surat keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 237 tentang penetapan gampong wisata di kabupaten Aceh Barat dan Lhok juga termasuk didalamnya. Lhok Bubon ini dengan pengunjung yang ramai memang setiap minggunya, dalam upaya pengembangannya pun terus kita benah perlahan, sejauh ini kita sudah melakukan beberapa program seperti penediaan sarana prasarannya. tentunya kita sudah membuat perencanaan-perencanaan program untuk mengembangkan Wisata Lhok Bubon itu, dan untuk tahun ini kita masih melakukan pembenahan dan untuk pelaksanaan program kedepannya berusaha untuk kita jalankan nantinya kita sesuaikan juga dengan anggaran yang ada Saat ini pun dari pihak pariwisata sendiri masih membuat pengajuan terkait Qanun pariwisata di Aceh Barat harapannya segera di berikannya qanun itu supaya kita punya dasar kuat untuk pengelolaannya.

Selanjutnya disampaikan Bapak Mirza selaku Kabid perencanaan dan programmengatakan :

“ Untuk perencanaan program nya kita memang punya, selain itu juga sudah di tetapkannya pemuda sadar wisata (POKDARWIS pada setiap gampong serta penetapan gampong dengan potensi wisata. Sehingga dengan adanya POKDARWIS ini akan sangat membantu dalam pengembangan wisata di gampong nantinya, dan untuk tahun ini saja kita akan melakukan perbaikan fasilitas yang ada seperti musola, pengecetan dan untuk perencanaan pengembangan selajutnya terus kita buat se inovatif mungkin dengan harapan lebih bagus lagi sehingga akan semakain ramai pengunjung yang datang” (wawancara tanggal 06 September 2021)

Selanjutnya jugak disampaikan oleh bapak Geucik Gampong Lhok Bubon

“Lhok Bubon memang sudah lama dan kantin-kanting nya pun memang sudah lama ada dibuat oleh masyarakat. Seiring berjalannya waktu kan semakain ramai wisatawan yang berkunjung dan peneglolaannyapun dari pemerintah jugak semakin ada, jadi kita dari gampong sendiri membuat kantin gampong dilokasi wisatanya yang kemudian kita sewakan kepada pedangan yang mw menyewanya nanti nya sewa dari kantin itu menjadi kas gampong, kalau untuk qanun khusus yang mengatur wisata ini kita memang masi belum ada, dan masi proses pengajuan ke pihak pemerintah, salama ini memang kalau qanun itu kita belum ada, sehingga kita agak sedikit susah dalam sepenuhnya melakukan pengelolaan serta pengambilan retribusi karna belum ada dasar nya yang kuat selain itu juga kita tidak fokus semua ke lhok bubon saja karena ada jugak yang harus kita bangun di gampong seperti perbaikan jalan dan lainnya”(wawancara tanggal 06 September 2021)

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti terhadap informan diatas, dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa kebijakan dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Aceh Barat sudah ada yang dibuktikan dengan adanya keputusan penetapan gampong wisata dan pentepan kelompok sadar wisata. Akan tetapi masi kurangnya Qanun yang mengatur tetang pariwisata dikabupaten Aceh Barat sehingga sebagai dasar untuk pengelolaan sepenuh nya terhadap objek wisata yang sudah di tetapkan.

4.2.2.2 Rancangan

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti dilapangan, yang berkaitan dengan rancangan lokasi wisata konsep serta tatanannya masi belum tertata dengan baik. Sebagaimana di sampaikan oleh ibuk Eva Nurlaita Hasibuan.,S.P(Kepala Bidang Pariwisata) mengatakan :

“ Pantai Lhok Bubon memiliki potensi yang cukup menarik, kondisi lokasinya yang indah, akan tetapi memang kalau kita lihat dari segi tatanannya masi perlu pembenahan, rancangan perencanaan-perencanaan yang kreatif dalam pengelolaannya, seperti tata letak fasilitas yang ada semacam kamar mandi itu harusnya bisa di sesuaikan lagi tempatnya, kemudian adanya tanaman-tanaman yang indah sebagai penghias sehingga akan semakin menarik.tetapi sebenarnya ini semua tidak hanya dari pihak kita akan tetapi ada kerjasama dari pihak Gampong dan pemilik kantin dilokasi wisata, pemilik kantin pun harusnya lebih kreatif dalam merawat tempat sehingga wisatawan pun tidak bosan begitu. Ini kita berharap semoga ada nya ide-ide kreatif dari pihak gampong untuk sama-sama kita tata lokasi wisata supaya lebih menarik, kan kalau semakin bagus lokasinya semakin banyak pengunjung yang datang, sehingga bisa memberi pengaruh baik dalam pendapatan kas daerah nantinya melalui retribusi penyewaan bangunan yang kita bangun di lokasi wisata dan masyarakat pun punya peluang untuk membuka usaha di lokasi wisata seperti membuat souvenir kas gampong misalnya dan lainnya.ini pun kita nantinya ingin membuat pertemuan pelatihan dengan penjual di lokasi wisata dalam upaya kita mengembangkan wisata lebih baik lagi karna memang masi kurangnya SDM yang ada.”(wawancara tanggal 06 September)

Selanjutnya di sampaikan oleh Geucik Gampong Lhok Bubon

“kita lihat memang tatanan Pantai Lhok Bubon ini, masi belum sepenuhnya bagus, kondisi jalannya itukan perlu di perbaiki jugak, terus bangunan-bangunannya belum sepenuhnya jugak ada dan tertata dengan baik gitu. Dari pihak pemda jugak sejauh ini sudah melakukan pengelolaan seperti penyediaan fasilitas seperti tong sampah, musolah dan kamar mandi yang ada di pantai lhok bubon.kita jugak dari pihak Gampong terus berupaya untuk mengembangkan Wisata Lhok Bubon.

Selanjutnya jugak disampaikan ibuk Lastriana selaku masyarakat Aceh

Barat mengatakan

“Pantai Lhok Bubon ini sudah ramai pengunjung sejak lama tapi untuk lokasi nya belum sepenuhnya menarik kalau dari segi pembangunan yang dibuat baik dalam hal tugas pemerintah maupun Gampong tetapi setidaknya adalah perubahan-perubahan yang lebih menarik dilokasi Lhok Bubon ini, karena memang wisata lhok bubon inikan sudah cukup lama terkenal sebagai sala satu Objek Wisata di Lhok Bubon jadi harusnya dari segi pembabangunannya jugak lebih di tingkatkan sehingga pengunjung dari luar daerah semakin tertarik, kalau kita lihat seperti bangunan tempat duduk yang di buat itu dicat gitu.”(wawancara Tanggal 05 September)

Selanjutnya disampaikan oleh ibuk Sela Afrika Diana selaku wisatawan mengatakan :

“Pantai Lhok Bubon bagus dan manarik saya selaku wisatawa ya merasa taretarik dan nyaman dilokasi wisata artinya saya menikmati objek wisata Lhok Bubon ini. Tapi memang kalau dilihat dari segi pengelolaan tatanannya masi belum dapat kita katakana sepenuhnya bagus gitu masi perlu untuk pembenahan yang lebih kreatif harapannya semoga kedepannya akan lebih bagus lagi” (wawancara tanggal 04 September)

Selanjutnya disampaikan oleh ibuk Sartika selaku wisatawan :

“Melihat dari segi keindahan pantai dan lokasinya lhok bubon ini memang bagus dan mearik akan tetapi kalau kita lihat dari segi tatanannya memang perlu perhatian lagi dari pemerintah maupun pihak gampong seperti penyediaan fasilitas tong sampah,kamar mandi yang memadai, perbaikan jalannya dan sesuatu yang kreatif gitu apa misalnya dibuatkan tempat bermain, sedikit taman-taman yang ada bunga indahny biar lebih cantik dan manarik.”(wawancara tanggal 04 September)

Berdasarkan hasil wawancaara dengan informan di atas dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa tatanan atau konsep rancangan dalam upaya pengembangan Objek Wisata Lhok Bubon sudah dilakukan akan tetapi masi belum sepenuhnya terata dengan baik dan masi butuh perencanaan-perencanaan program dengan konsep atau rancangan yang lebih kreatif dan dalam pelaksanaanya pun sangat penting kerjasama dengan stakeholder supaya menghadirkan hasil yang lebih baik.

4.2.2.3 Analisis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, berkaitan dengan analisis terdapat peluang, tantangan, hambatan serta kendala dalam melakukan pengembangan objek Wisata Lhok Bubon, tentu saja dari segi analisis yang dilakukan perlu perbaikan-perbaikan upaya pengembangan objek wisata secara efektif dan efisien. Sebagaimana disampaikan Ibu Eva Nurlaita Hasibua.,S.P (Kepala Bidang Pariwisata)

“ Jika di lihat, dalam proses pengembangan objek wisata ini memiliki berbagai ragam permasalahan. baik itu dari segi tantangannya, kendalanya, hambatannya serta peluangnya dan banyak lagi yang kita perlu lihat. Karena memang semua itu harus benar-benar melihat peluang titik objek wisata yang memang lebih kita prioritaskan untuk di kelola, dikembangkan, ketika suatu objek wisata itu menjadi prioritas untuk dikembangkan artinya kita sudah siap dengan berbagai persiapannya dan sudah tahu tantangannya, peluangnya apa, hambatan dan kendalanya apa sehingga segala apa yang direncanakan dapat berjalan seperti yang diharapkan. Kan harapannya seperti yang sudah disampaikan bahwa semakin baik dan berkembang objek wisata itu maka semakin baik pula terhadap retribusi yang diberikan kepada daerah. Namun kembali lagi kita lihat peluang dari objek wisata itu, berbicara Objek Wisata Lhok Bubon memang memiliki peluang untuk memberikan retribusi pendapatan terhadap kas daerah maupun gampong itu sendiri dan tentunya hambatan dan tantangannya itu ada tapi kita terus berupaya untuk menyesuaikan artinya ada peluang juga hambatan, melihat peluang juga melihat hambatan jadi pandai-pandai mengelolah itu semua dan pantai lhok bubon sendiri memang memberikan retribusi terhadap PAD di Aceh Barat. melalui penyewaan bangunan yang kita bangun di lokasi itu, namun, sejauh ini dari saya kerja di dinas pariwisata ini dan sebagai kabis pariwisata dari tahun 2018 memang PAD yang dihasilkan tidak banyak hanya tiga juta saja, makannya sebenarnya perlu untuk kita buat program-program keratif itu tapi karna anggaran kita juga terbatas jadi berupaya seadanya saja dulu. ”(wawancara 06 September 2021)

Selanjutnya di sampaikan oleh Geucik Gampong Lhok Bubon

“Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa Lhok Bubon ini kan sebelum tsunami pun ada pengunjung tapi kalau untuk pengelolaannya belum ada seperti saat ini, kalau lihat saat ini pengunjung semakin ramai artinya memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan sehingga berdampak baik juga untuk masyarakat gampong tentunya, mereka bisa membuat kantin-kantin seperti sekarang kan banyak itu kantin-kanting sehingga mengurangi juga dampak pengangguran. Kita juga lihat dari tantangan serta kendalanya yang menjadi penghambat tentunya untuk kita melakukan pengembangan objek wisata ini” (wawancara tanggal 06 September 2021)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan dapat peneliti simpulkan bahwasanya Objek Wisata Lhok Bubon memiliki peluang untuk terus dikembangkan karena lokasi wisatanya yang menarik perhatian wisatawan ramai berkunjung sehingga akan sangat membantu dalam meningkatkan kas daerah melalui retribusi penyewaan fasilitas yang di sediakan dan mengurangi tingkat pengangguran khususnya di Gampong Lhok Bubon.

4.2.3 Kendala Dalam Perencanaan Program Pengembangan Wisata Pantai Lhok Bubon Kabupaten Aceh Barat

Dalam proses perencanaan program pengembangan wisata sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Aceh Barat berdasarkan dari hasil penelitian serta wawancara peneliti dengan beberapa informan masi terdapat hambatan/kendala dalam pengembangan Objek Wisata Lhok Bubon. Sebagaimana di sampaikan oleh ibuk Eva Nurlaita Hasibuan.,S.P(kabid pariwisata) :

“Masalah kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program yang sudah dibuat seperti yang sudah disampaikan sebelumnya kembali kita kepada anggaran.karena memang kendala atau hambatan terbesar nya ini terletak

pada anggaran kita. Terlebih lagi kondisi pandemic covid-19 saat ini membuat sumber anggaran kita memang terbatas sehingga untuk melaksanakan program-program yang sudah kita rencanakan itu menjadi terhambat apalagi untuk 2 tahun kedepan memang kita tidak bisa menjalankan program dengan anggaran yang banyak sehingga kita hanya bisa melakukan perbaikan, pembenahan fasilitas yang sudah ada. Selain terhambat dengan kendala jugak kurangnya SDM serta kerjasama dari pihak gampong dan pemilik kantin dilokasi wisata untuk mengembangkan objek wisata dengan baik. Kemudian selain itu jugak kita masi belum ada qanun pariwisata khusus di Aceh barat karena tidak semua yang menjadi objek wisata di aceh barat menjadi wewenang kabupaten dalam pengelolaannya.”(Wawancara tanggal 06 September 2021)

Selanjutnya disampaikan oleh bapak Mirza (Kabid Perencanaan dan Keuangan)

“Lagi dan lagi ya kita kembali ke anggaran kalau ditanya masalah hambatan dalam pengembangan wisata ini. Karena memang anggaran kita ini sangat terbatas ditambah lagi harus kita sesuaikan semaksimal mungkin untuk setiap pelaksanaan kegiatan program. Meskipun kita akui bahwa pada sektor pariwisata itu memang memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah tapi memang anggaran saat ini terbatas ya kita paham sendiri kondisi pandemi ini sehingga anggaran itu dilimpahkan banyak ke sana. Kalaupun kita buat program ini dengan anggaran yang minim tidak akan selesai dan bisa mati nanti nya di tengah jalan” (wawancara tanggal 07 September)

Selanjutnya jugak disampaikan Geucik Gampong Lhok Bubon

“Tentu saja jika suatu perencanaan sekedar rencana, tanpa dijalankan ya sama aja begitukan artinya tidak ada tindakan nyata yang dijalankan, tapi mau bagaimana lagi dalam menjalankan program-program sebagai upaya kita untuk mengembangkan objek wisata ini pastinya membutuhkan anggaran yang cukup sehingga nanti nya kerjaan pencapaian yang kita rencanakan dapat berjalan sesuai harapan. Tapi kita memang terkendala dengan anggaran jugak. Kemudian kita juga dalam hal dasar hukum belum ada qanun khusus dikampong terkait wisata ini sehingga kita belum ada dasar yang kuat untuk memperoleh retribusi dari Objek Wisata Lhok Bubon dan masi dalam tahap pembuatan rancangan untuk kita ajukan. Kemudian terkait SDM kita masi kurang dan perlu pembinaan lagi dari pihak pemerintah untuk mendampingi, membina seperti dilakukannya pelatihan dengan kita masyarakat maupun pihak-pihak pengelola kantin di lokasi wisata agar saling sinkron satu arah untuk kemajuan Objek Wisata Lhok Bubon. (wawancara tanggal 06 September 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di atas bahwa terdapat hambatan pelaksanaan perencanaan program dalam mengembangkan objek wisata lhok bubon diantaranya kurangnya anggaran terhadap program pengembangan objek wisata itu sendiri sehingga menjadi faktor utama dalam menghambat terlaksananya perencanaan-perencanaan yang telah direncanakan untuk dijalankan dengan maksimal.selanjutnya kurangnya SDM yang memadai di kalangan struktural gampong maupun pengelola kantin yang seharusnya berperan penting dalam membantu

mengembangkan objek wisata Lhok Bubon.selanjutnya terkait dasar hukum/qanun khusus tetang pariwisata di Kabupaten Aceh Barat yang masi dalam tahap pembuatan untuk di ajukan ke pihak Provinsi. Sehingga adanya keterbatasan dalam wewenangnya karena tidak semua objek wisata menjadi wewenang kabupaten dalam pengelolaannya

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Perencanaan Program Pengembangan Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Barat

Sektor pariwisata menjadi salah satu potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Berbagai Potensi wisata yang ada tentunya memberikan keuntungan besar dalam membantu kekayaan daerah serta memberikan kontribusi yang besar bagi daerah hal ini berdasarkan penjelasan undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Bahwa sektor kepariwisataan dapat mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Banyaknya potensi wisata yang ada tentunya perlu adanya pengelolaan pada sektor pariwisata secara terarah dan terencana sebagai upaya pengembangan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kas daerah melalui objek pariwisata.

Dalam pengelolaan pengembangan sektor pariwisata tentunya dilakukan oleh pihak yang memiliki tugas dalam mengelola sektor pariwisata dengan perencanaan-perencanaan yang mampu mengembangkan potensi wisata lebih maju dan berkembang lagi. Dalam hal ini dinas pariwisata pemudah dan olahraga (DISPARPORA) khususnya kabupaten Aceh Barat bertanggung jawab atas pengelolaan sektor pariwisata. Aceh Barat memiliki potensi wisata yang tidak kalah menarik dengan potensi wisata pada daerah lain hal ini dibuktikan terdapat 35 objek wisata di Aceh Barat. Banyaknya objek wisata yang ada tentu saja perlu dilakukannya pengelolaan yang baik pula sehingga potensi wisata akan semakin berkembang dan diramaikan banyak wisatawan baik wisatawan lokal maupun

luar daerah. Dalam upaya pengembangan objek wisata perlu dilakukan perencanaan yang baik. Perencanaan sebagai upaya untuk mengembangkan objek pariwisata sebagaimana diketahui perencanaan sebagai salah satu proses dalam merubah suatu keadaan yang ingin dicapai sesuai dengan apa yang diinginkan dan dituju. Perencanaan yang baik tentu saja memiliki berbagai cakupan sebelum melaksanakannya. Perencanaan menjadi dasar konsep kedepannya dalam menjadikan sektor pariwisata terus memiliki kemajuan dan perkembangan serta dikelola dengan baik dan memberikan kontribusi besar pada daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, objek wisata Pantai Lhok Bubon telah memberikan retribusi terhadap peningkatan pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat. Pendapatan yang di peroleh melalui penyewaan bangunan yang di sediakan oleh pemerintah di lokasi Objek Wisata Pantai Lhok Bubon. Dalam pengelolaan bangunan tersebut di kelola oleh pihak gampong yang untuk selanjutnya melalui pihak Gampong memberikan hasil retribusi kepada Dinas DISPARPORA. Pelaksanaan perencanaan program pengembangan wisata sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat sudah di bentuknya perencanaan-perencanaan program yang menjadi kebijakan untuk mengembangkan objek wisata Pantai Lhok Bubon lebih baik lagi. Namun, pada tahap pelaksanaan program yang sudah di rencanakan masi belum efektif dan efesien terjalankan, masi terdapat kendala dan hambatan sehingga program-program yang sudah di buat belum terlaksana sesuai apa yang diharapkan.

5.2 Indikator Keberhasilan Perencanaan Program Pengembangan Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

5.2.1 Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan sudah ada beberapa aturan atau regulasi dalam upaya pengembangan objek wisata Kabupaten Aceh Barat, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

Tabel.5.2

Peraturan/regulasi upaya pengembangan objek pariwisata di Kabupaten Aceh Barat

No	Peraturan/regulasi
1	Qanun Aceh Barat Nomor 54 Tahun 2021 tentang kependudukan, fungsi, tugas dan tata kerja dinas pariwisata pemuda dan olahraga Kabupaten Aceh Barat
2	Keputusan Bupati No.54 tahun 2021 tentang penetapan gampong wisata di Kabupaten Aceh Barat
3	Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat No.073 Tahun 2021 tentang penetapan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan dari penjelasan tabel di atas, bahwasanya dalam hal kebijakan pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan sehingga Pemerintah memiliki wewenang yang jelas dalam upaya mengembangkan objek wisata di

Kabupaten Aceh Barat. Regulasi atau peraturan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas, fungsi serta percepatan dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Aceh Barat. Meskipun sudah ada beberapa aturan yang ada masih perlu di buatnya aturan yang mengatur tentang pengelolaan pariwisata karena, untuk Qanun tentang pariwisata di Aceh Barat sendiri masih belum memberikan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah di tingkat kabupaten. Meskipun terdapat banyak objek wisata di kabupaten Aceh Barat tapi tidak semua dalam hal perizinan pengelolaannya di berikan wewenang kepada pihak kabupaten, berikut tabel perizinan pengelolaan jenis pariwisata dengan risiko tinggi yang yang menjadi wewenang provinsi dalam pemberian izin pengelolaannya.

Tabel.5.3

Standar usaha kegiatan pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata yang merupakan kewenangan Gubernur

No	Bidang Usaha	Risiko	Ket
1	Pengelolaan Goa	Menengah tinggi	
2	Angkutan sungai dan danau	Menengah tinggi	
3	Restoran	Menengah tinggi	Jumlah tempat duduk tamu 101-200 unit
4	Jasa boga untuk suatu iven Tertentu	Menengah tinggi	
5	Wisata petualangan alam	Menengah tinggi	
6	Usaha arena permainan	Menengah tinggi	
7	Arung jeuram	Menengah tinggi	
8	Wisata selam	Menengah tinggi	
9	Wisata memancing	Menengah tinggi	
10	Wisata olahraga minat khusus	Menengah tinggi	

Dari penjelasan tabel di atas dapat kita lihat bahwasahnya tidak semua sektor pariwisata menjadi wewenang pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam pengelolaannya sehingga sangat perlu adanya Qanun yang mengatur tentang pariwisata di kabupaten Aceh Barat.

5.2.2 Rancangan

Dalam pembuatan suatu perencanaan program yang baik tentu saja perlu arah dan konsep yang jelas sehingga menjadikan suatu perencanaan dengan tujuan dan capaian yang jelas. Dalam upaya pengembangan objek wisata sangat penting untuk di buat konsep serta rancangan yang kreatif dan inovatif sehingga menghadirkan tatanan yang jelas untuk di jalankan. Dalam hal pengembangan objek wisata sangat di perlukan ide-ide kreatif melalui SDM yang dimiliki tentunya, potensi wisata yang menarik tidak hanya mengandalkan keindahan dalam pengembangan objek wisatanya melainkan adanya pengelolaan yang baik melalui perencanaan, program-program yang kreatif dan inovatif sehingga akan menjadikan objek wisata semakin menarik kedepannya. Dari tatanan objek wisata yang sudah di kelolah pemerintah di Pantai Lhok Bubon masi belum tertata dengan maksimal serta penyediaan fasilitas yang masi kurang, sehingga masi perlu untuk di buat program-program dalam upaya pengembangan objek Wisata Pantai Lhok Bubon. Selanjutnya dalam upaya pengembangan objek wisata Pantai Lhok Bubon Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga (DISPARPORA) sudah menetapkan rancangan program serta kegiatan terhadap pengembangan objek wisata di Kabupaten Aceh Barat. Sebagaimana di jelakan pada lampiran perubahan rencana Strategis-P (RESTRA) Tahun 2017-2022

Tabel.5.4
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Bidang Pariwisata
Tahun 2021-2022

No	Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	
			2021	2022
1	Program Pemasaran Pariwisata	Program		
	Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Pariwisata	Kegiatan	680.000.000	680.000.000
	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam/Luar Negeri Pariwisata Kab/Kota	Sub Kegiatan	680.000.000	680.000.000
	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam/Luar Negeri Pariwisata Kab/Kota	Sub Kegiatan	265.000.000	265.000.000
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik Dan Media Lainnya Baik Dalam Dan Luar Negeri	Sub Kegiatan	340.000.000	340.000.000
2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program	125.000.000	125.000.000
	Pelaksanaan Peningkatan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kegiatan	125.000.000	125.000.000
	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru Dan Pelajar(Mahasiswa Dan Siswa Pariwisata)	Sub Kegiatan	50.000.000	50.000.000
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Sub Kegiatan	75.000.000	75.000.000
3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Program	336.571.000	336.571.000
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Sub Kegiatan	336.571.000	336.571.000
	Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Sub Kegiatan	54.456.000	54.456.000
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Sub Kegiatan	50.000.0000	50.000.000
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana Dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	234.115.640	234.115.640	234.115.640

	Kab/Kota				
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Kegiatan	1.000.000.000	1.000.000.000	
	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Sub Kegiatan	1.000.000.000	1.000.000.000	
Jumlah			8.719.000.000	8.719.000.000	

Sumber: lampiran perubahan rencana strategis-P (RESTRA) tahun 2017-2022

Berdasarkan keterangan dari tabel di atas, bahwasanya dinas pariwisata, pemuda dan olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Aceh Barat telah menetapkan beberapa program, kegiatan serta pendanaan pengembangan objek wisata di Kabupaten Aceh Barat dalam RESTRA 2021-2022.

Dari hasil pengamatan penulis, dalam penetapan berbagai program kegiatan yang sudah di buat berdasarkan tabel di atas dari penetapan kegiatan program tahun 2017-2022 tidak ada program atau kegiatan yang di khususkan pada objek wisata pantai lhok bubon. Artinya pemerintah tidak memprioritaskan hanya pada satu titik objek wisata dalam perencanaan program pengembangannya. namun, melihat peluang yang lebih di utama untuk di kembangkan. Seperti halnya Objek Wisata Pantai Lhok Bubon pemerintah sudah membuat perencanaan program sebagai upaya mengembangkan sebagai berikut :

Tabel. 5.5

Pendanaan pelaksanaan program Objek Wisata Pantai Lhok Bubon tahun 2021

No	Uraina	Jumlah anggaran	Keterangan
1	Pemeliharaan Bangunan Destinasi Wisata Pantai Lhok Bubon	15.000.000	Belum terealisasi
2	Pembuatan Flying Fox		Belum terealisasi
3	Pelatihan Pembuatan Qanun		Belum terealisasi
Jumlah		15.000.000	

5.2.3 Analisis

Dalam penetapan suatu Gampong yang memiliki potensi wisata tentu saja melalui berbagai pertimbangan sehingga dapat ditetapkan gampong tersebut memiliki potensi wisata untuk dikembangkan. Pantai Lhok Bubun menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan peluang yang dilihat bahwasanya Pantai Lhok Bubon memiliki potensi untuk di kembangkan. Objek Wisata Pantai Lhok Bubon menjadi salah satu objek wisata yang memberikan retribusi terhadap penambahan pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Barat. Tidak hanya peluang akan tetapi terdapat tantangan dan hambatan dalam pengembangan objek wisata. Pantai Lhok Bubon memiliki peluang untuk terus terus dikembangkan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan pengembangan Objek Wisata Lhok Bubon melalui perencanaan-perencanaan program yang sudah dilakukan masi terdapat kendala/hambatan dalam pelaksanaannya.

Tabel.5.6

Perkembangan realisasi pendapatan asli daerah dari Objek Wisata Pantai Lhok Bubon Tahun 2017-2021

No	Tahun	Pendapatan
1	2017	3.000.000
2	2018	3.000.000
3	2019	3.000.000
4	2020	3.000.000
5	2021	3.000.000

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa objek wisata Pantai Lhok Bubon memberikan retribusi terhadap penambahan kas Daerah, akan tetapi tidak ada peningkatan pendapatan dari objek Wisata Pantai Lhok Bubon selama 5 tahun terakhir. Tentunya hal tersebut menjadi perhatian perlunya objek wisata Pantai Lhok Bubon untuk terus dikembangkan melalui program-program yang kreatif dan inovatif serta perhatian dari berbagai stakeholders dalam membantu pengelolaannya.

5.3 Kendala Dalam Perencanaan Program Pengembangan Wisata Terhadap Peningkatan Pendapat Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat

Dalam pelaksanaan program pengembangan objek Wisata Pantai Lhok Bubon, belum terjalankan dengan maksimal masih terdapat hambatan/kendala yang dihadapi pemerintah, diantaranya :

a. Anggaran

Tentu saja dalam setiap pelaksanaan program membutuhkan anggaran yang cukup untuk setiap programnya. Dalam pengembangan Objek Wisata Pantai Lhok Bubon masih terkendala dengan anggaran, dimana anggaran untuk setiap program masih sangat terbatas sehingga dalam pelaksanaan program yang sudah direncanakan belum dapat dilakukan dengan maksimal.

b. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang memadai tentunya mempengaruhi terhadap pengembangan objek wisata melalui perencanaan-perencanaan yang strategis kreatif dan inovatif akan menunjang berkembangnya objek wisata. Dalam tugas pelaksana pengembangan Objek Wisata Pantai Lhok

Bubon masi belum memiliki SDM yang memadai, meskipun sudah memberikan kinerja terhadap perubahan kearah yang lebih baik. Kurangnya SDM tidak hanya dari unsur tugas pelaksan pengembangan objek wisata akan tetapi dari pihak gampong serta pemilik usaha di lokasi Lhok Bubon jugak belum memiliki SDM yang cukup dalam membantu mengembangkan Objek Wisata Pantai Lhok Bubon.

c. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang terdedia di Pantai Lhok Bubon masi perlu penambahan sehingga kurangnya pengadaan menjadi tantangan dalam pengembangan objek wisata. Kurangnya fasilitas yang disediakan pihak pemerintah di lokasi wisata, diharapkan dapat dilakukannya penambahan fasilitas sarana prasarana yang memadai.

d. Qanun Tentang Pariwisata

Dalam melakukan pengelolaan suatu obejk wisata tentu saja memiliki pedoman atau landasan dalam pelaksanaanya. Akan tetapi qanun tentang pariwisata di Kabupaten Aceh Barat sendiri masi belum ada sehingga menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan pengembangan objek pariwisata.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat peneliti ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan program pengembangan objek wisata Pantai Lhok Bubon Pemerintah sudah membuat perencanaan/kebijakan untuk mengembangkan Objek Wisata Pantai Lhok Bubon yang diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisatawan sehingga akan memberikan retribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat. Dalam upaya pengembangan pelaksanaan pengembangan objek wisata melalui perencanaan program yang di buat oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat sudah membuat konsep perencanaan pengembangan yang terarah dan jelas.
2. Hambatan/kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengembangan Objek Wisata Pantai Lhok Bubon terdapat beberapa kendala yakni masi terbatasnya anggaran yang dimiliki, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai, kurangnya wewenang pemerintah dalam melakukan pengelolaan sektor pariwisata,masi kurangnya koordinasi/kerjasama antara pihak gampong dengan pemerintah, dan selanjutnya kurangnya mindset masyarakat yang kurang peduli terhadap pengembangan objek Pariwisata di Lhok Bubon.
3. Objek wisata Pantai Lhok Bubun menjadi salah satu penyumbang retribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Barat

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, peneliti memiliki saran serta masukan yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan kedepannya :

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah kerangka ilmiah serta memberikan sumbangsi pemikiran terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk bisa memprioritaskan dalam pengembangan objek pariwisata Pantai Lhok Bubon karena memiliki peluang yang bagus untuk terus di kelola. Selain itu diharapkan untuk membuat konsep perencanaan program, tatanan lokasi serta rancangan lokasi wisata lebih kreatif dan inovati.selain itu, perlu adanya penambahan personil/tenaga kerja pegawai khususnya di bidang pariwisata serta penambahana fasiltas guna meningkatkan kenerja kedepannya.
3. Diharapkan kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahra (DISPARPORA), pemerintah daerah serta lembaga-lembaga yang terkait lainnya bisa memperjuangkan dalam pemenuhan anggran pengembangan Objek Wisata Pantai Lhok Bubon melalui bernagai usulan baik itu dari Provinsi maupun Nasional.
4. Diharapka kepada DISPARPORA bisa melakukan sosialisasi, pelatihan pendampingan terhadap masyarakat khususnya masyarakat Gampong Lhok Bubon dalam mebuat program-program yang kreatif dan inovatif sebagai upaya pengembangan objek wisata lhok bubon, selain itu diharapkan kepada DISPARPORA, Pemerintah, pihak Gampong bisa

meningkatkan kerja sama yang baik dalam pengembangan Objek Wisata Pantai Lhok Bubon.

DAFTAR PUSTAKA

Elviza Refni (2018). *Analisi Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Nanda safangangawan (2019). *Peran pemerintah daerah pengembangan potensi pariwisata di kabupaten simeulue*. Skripsi Universitas Teuku Umar

Putra, Madani, Tahir, (2020) *Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Vol 1, Nomor 3 Desember 2020

Pangestika (2019) *Perencanaan Pengembangan Wisata Budaya Dan Religi di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi Universitas Negeri Malang.

Prhatin, daryanti, pramadha (2019), *Aplikasi Teori Perencanaan*. Yogyakarta. CV Buana Grafika

Sudirman, Sarman, Susilawaty. (2020). *Promosi Pariwisata Melalui Digital Diplomacy: Upaya Internasionalisasi Pariwisata Daerah*. Jurnal Ilmu Komunikasi UHO. Vol.5, No. 3 Juli 2020, hlm 174.185.

Sugiyono, (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung Afabeta

Taufikurokhman, (2008), *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan*, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Moestopo Beragama

Undang-Undang Nomor. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional

Qanun Aceh Nomor.8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan

Lampiran 1.Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara kepada kepala DISPARPORA Kabupaten Aceh Barat

1. Apakah ada peraturan/kebijakan yang menetapkan Gampong dengan potensi wisata ?
2. Apakah ada Qanun Aceh Barat yang mengatur tentang pariwisata ?
3. Bagaimana potensi wisata di Kabupaten Aceh Barat ?
4. Bagaimana langkah yang akan dilakukan pemerintah dalam mengembangkan wisata pantai Lhok Bubon ?
5. Bagaimana proses pengelolaan sector pariwisata ?
6. Apakah ada perencanaan program yang strategis dalam upaya pengembangan wisata ?
7. Bagaimana keterlibatan pemerintah daerah dengan pihak gampong dalam proses perencanaan ?
8. Apakah wisata pantai lhok bubon menjadi salah satu fokus pemerintah untuk dikembangkan ?
9. Bagaimana peningkatan wisatawan setiap tahunnya ?
10. Program apa saja yang sudah dijalankan dalam pengembangan objek wisata pantai lhok bubon ?
11. Apakah ada anggaran khusus dalam pengelolaan sektor pariwisata ?
12. Bagaimana proses pengelolaan keuangan dari sektor pariwisata ?
13. Apakah pantai lhok bubon menjadi sangat berperan dalam membantu meningkatkan PAD di Aceh Barat ?
14. Sektor pariwisata apa yang menjadi unggulan di Kabupaten Aceh Barat ?
15. Apakah retribusi yang di peroleh dari sektor pariwisata membantu pembangunan daerah ?

16. Apa yang akan dilakukan dinas pariwisata jika terdapat objek wisata baru yang di kelolah oleh masyarakat setempat ?
17. Apa saja yang menjadi penghambat/kendala dalam proses pengembangan objek wsiata ?
18. Apakah konsep pengelolaan pengembangan objek wisata di Kabupaten Aceh Barat sesuia dengan konsep otonomi daerah ?
19. Apakah ada hambatan dalam pengelolaan dan pengembangan bidang pariwisata bila di hubungkan dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan ?

B. Wawancara kepada pegawai BPKD Aceh Barat

1. Apakah ada peraturan/kebijakan tentang pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari retribusi sektor pariwisata ?
2. Apakah retribusi sektor pariwisata menjadi penyumbang besar dalam peningkatankas daerah ?
3. Berapa banyak PAD yang dihasilkan dari sektor pariwisata setiap tahunnya ?
4. Bagaimana perbandingan pendapatan dari sektor pariwisata setiap tahunnya ?
5. Apakah setiap objek wisata memberikan retribusi yang berbeda ?
6. Apakah dalam pengelolaan keuangan khususnya retribusi selalu mengutamakan prinsip Otonomi Daerah ?

C. Wawancara kepada geucik dan masyarakat Gampong Lhok Bubon

1. Apakah ada peraturan/kebijakan Gampong yang mengatur objek Wisata Pantai Lhok Bubon ?
2. Apa saja potensi unggulan yang di miliki Pantai Lhok Bubon?
3. Apasaja yang sudah dilakukan pihak Gampong dalam membantu mengembangkan obejk Wisata Pantai Lhok Bubon ?

4. Apa saja program dari Gampong dalam mendukung pengembangan Pantai Lhok Bubon ?
5. Bagaimana ketelibatan pihak Gampong dalam proses pengembangan objek wisata Pantai Lhok Bubon ?
6. Bagaimana kerjasama gampong dan pemerintah daerah dalam mengembangkan Pantai Lhok Bubon ?
7. Apakah ada anggaran khusus dari gampong untuk pengelolaan pantai Lhok Bubon ?
8. Apakah ada pihak khusus yang membantu dalam pengembangan objek Wisata Pantai Lhok Bubon ?
9. Apa saja yang menjadi kendala dalam mengembangkan objek wisata Pantai Lhok Bubon ?
10. Apakah ada kegiatan pembinaan dari pemerintah dalam mengembangkan objek Wisata Pantai Lhok Bubon ?

D. wawancara dengan wisatawan

1. Bagaimana menurut anda objek wisata Pantai Lhok Bubon ?
2. Bagaimana menurut anda fasilitas yang tersedia di Pantai Lhok Bubon ?
3. Bagaimana menurut anda pengelolaan objek Wisata Pantai Lhok Bubon ?
4. Apa yang membuat anda tertarik dengan objek Wisata Pantai Lhok Bubon ?

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara



Wawancara Bersama Bapak Abdullah
Kadis DISPARPORA



Wawancara bersama buk. Eka nurlaita
Kabid Pariwisata



Wawancara bersama bapak.Mirza
Kabid keuangan dan program



Wawancara bersama Bapak Zul Arsil
Kasubbid pengendalian dan pelaporan pendapatan



Wawancara bersama Geucik Gampong Lhok Bubon



Wawancara Bersama Ibuk Lasteriana Masyarakat Lhok Bubon



Wawancara bersama salah satu masyarakat lhok bubon



Wawancara buk sartika masyarakat lhok bubon



Wawancara bersama salah satu wisatawan lhok bubon



Wawancara bersama salah satu Wisatawan Pantai Lhok Bubon

Lampiran 6. Biodata Penulis

BIODATA

Nama :Fengki Lovenia

NIM :1705905010017

Tempat/Tanggal Lahir : Silengas, 04 Maret 1997

Agama : Islam

Alamat Tempat Tinggal : Jl. Tengku Diujung Desa Suka Karya,
Kecamatan Simeulue Timur. Kabupaten
Simeulue

Nama Orang Tua

Ayah : Arsanudin

Ibu : Rosdiana

Alamat Orang Tua : Jl. Tengku Diujung Desa Suka Karya,
Kecamatan Simeulue Timur. Kabupaten
Simeulue

Pendidikan yang telah ditempuh :

: -SD N 14 Sinabang (2005-2011)

: -SMP N 1 Sinabang (2011-2014)

: -SMK N 1 Sinabang (2014-2017)

Pengalaman Kerja/Organisasi :

- Sekretaris Unit Kegiatan Mahasiswa Penanggulangan kebencanaan (2017-2018)
- Kabid Lingkungan UKM Penanggulangan Kebencanaan (2018-2019)
- Sekbid Keagamaan BEM FISIP (2018-2019)
- Kepanitian pelaksanaan LK-1 FISIP
- Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara
- Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus